

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPUTUSAN
TATA USAHA NEGARA TENTANG PEMBEBASAN
LAHAN OLEH PEMPROV DKI BERTENTANGAN
DENGAN AAUPB DAN UNDANG-UNDANG
(Studi Kasus Perkara Nomor 267K/TUN/2016)**

SKRIPSI

**Oleh:
IVAN HALOMOAN TAMBUNAN
201410115105**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Tentang Pembebasan Lahan Oleh Pemprov DKI Bertentangan Dengan AAUPB Dan Undang-Undang (Studi Kasus Perkara Nomor 267K/TUN/2016)

Nama Mahasiswa : Ivan Halomoan Tambunan

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115105

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum



pembimbing I

Nina Zainab.,SH,MH
NIP:011606055

pembimbing II

Putra Perdana Ahmad S ,SH.,MH
NIP:011503034

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi

: Tinjauan Yuridis Sengketa Tata Usaha
Negara Terhadap Keputusan
Administrasi Negara Tentang
Pembebasan Lahan Oleh Pemprov
DKI (Studi Kasus Perkara Nomor
267K/TUN/2016)

Nama Mahasiswa

: Ivan Halomoan Tambunan

Nomor Pokok Mahasiswa

: 201410115105

Program Studi/Fakultas

: Ilmu Hukum/Hukum



LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Tentang Pembebasan Lahan Oleh Pemprov DKI Bertentangan Dengan AAUPB Dan Undang-Undang (Studi Kasus Perkara Nomor 267K/TUN/2016)

Nama Mahasiswa : Ivan Halomoan Tambunan

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115105

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal lulus Ujian Skripsi : 9 Juli 2018

Bekasi, 18 Juli 2018
MENGESAHKAN,

Ketua Tim Pengaji : Dr. Yurnal, SH, M.Hum
NIP 9903261223

Pengaji I : Rahmat Saputra, SH.,MH
NIP 01160649

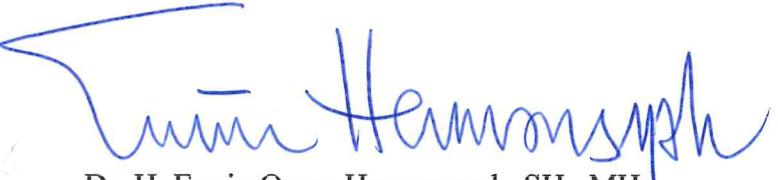
Pengaji II : Nina Zainab, SH.,MH
NIP 011606055

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Ilmu Hukum


Elfirda Ade Putri SH.,MH
NIP 011512043


Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH
NIP 1804338

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Tentang Pembebasan Lahan Oleh Pemprov DKI Bertentangan Dengan AAUPB Dan Undang-Undang (Studi Kasus Perkara Nomor 267K/TUN/2016)*”.

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengijinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui perpustakaan Univeristas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan Skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikan melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 23 Juli 2018
Yang membuat pernyataan



Ivan Halomoan Tambunan
201410115105

ABSTRAK

Ivan Halomoan Tambunan, 201410115105, Skripsi. *Tinjauan Yuridis Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Tentang Pembebasan Lahan Oleh Pemprov DKI Bertentangan Dengan AAUPB Dan Undang-Undang (Studi Kasus Perkara Nomor 267K/TUN/2016)*

Keputusan Tata Usaha Negara harus sesuai dengan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, jika tidak akan berakibat pada dinyatakan batal atau tidak sahnya KTUN. Salah satu kasus mengenai terbitnya KTUN yang berakibat kepada pembebasan lahan, terdapat dalam putusan PTUN Jakarta Nomor 59/G/2016/PTUN-JKT. Dalam hal ini peneliti tertarik meneliti mengenai sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya KTUN, serta pertimbangan hakim mahkamah agung dalam mengabulkan Surat Keputusan objek sengketa.

Dalam rangka menjawab permasalahan di atas, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan kasus. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan model interpretasi.

Hasil penelitian menyatakan bahwa dari aspek prosedur penerbitan Surat Keputusan objek sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama atas kepastian hukum dan atas keterbukaan.

Kata Kunci: PTUN, Aspek Prosedur, Pembebasan Lahan, Keputusan TUN

Pembimbing
Nina Zainab, SH.,MH
Putra Perdana Ahmad S, SH.,MH

ABSTRACT

Ivan Halomoan Tambunan, 201410115105, Skripsi. Judicial review of state administrative decisions about land acquisition by DKI government contrary to AAUPB and Constitution (Case Study of Supreme Court Decision No: 267K/TUN/2016)

Validity of state Administration decision must be appropriate with law and good general principle government, if it is not, it will cause the cancellation or invalidity of state Administration decision. One of the cases about the rise of KTUN which resulted in land acquisition, is contained in Jakarta state administration decision number 59/G/2016/PTUN-JKT. Researchers are attracted to research about the dispute arising due to the issuance of the KTUN, and judge consideration of the supreme court in granting the dispute object decision.

In order to answer that problem research method used on this research is using normative juridical research type by law approach and case approach method. Analytical method used is qualitative by using interpretation models

Research result claim that publishing procedure of dispute object decision letter by defendant has conflicted with rules and good government general procedure especially the principle of legal certainty and openness

Key Words : PTUN, Procedure Aspect, Land Acquisition, Decision Of TUN

Advisor
Nina Zainab, SH.,MH
Putra Perdana Ahmad S, SH.,MH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan kasihNya yang selalu melimpah terhadap penulis ditengah perjuangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu dan tanpa hambatan yang berarti.

Penulisan skripsi ini, penulis memilih judul: “*Tinjauan Yuridis Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Tentang Pembebasan Lahan Oleh Pemprov DKI Bertentangan Dengan AAUPB dan Undang-Undang (Studi Kasus Perkara Nomor 267K/TUN/2016)*”.

Skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan berbagai pihak. Karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs.Bambang Karsono,S.H.,M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr.H.Erwin Owan Hermansyah, S.H.M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Prof. Drs.Koesparmono Irsanm S.H.,M.H.,M.B.A., selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tanpa batas dan sedekat apa pun selalu membimbing dan memberikan pemikiran transformatif.
4. Nina Zaenab S.H.,M.H., selaku Pembimbing I yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi, pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Putra Perdana Ahmad S, S.H.,M.H.,selaku Pembimbing II yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi, pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh civitas akademik yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-satu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis.
7. Kedua orang tua penulis, terima kasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh dan mendidik, dan memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai sesuai harapan penulis.
8. Untuk teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang ikut pula memberikan pencerahan pemikiran kepada penulis

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan.oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Bekasi 23 Jun 2018

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
MOTTO.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi, dan Perumusan Masalah.....	5
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	5
1.2.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	7
1.4 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual,Kerangka Pemikiran.....	7
1.4.1 Kerangka Teori.....	7
1.4.2 Kerangka Konseptual.....	11
1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	13

1.5	Metode Penelitian.....	14
1.5.1	Jenis Penelitian.....	13
1.5.2	Bahan Hukum.....	13
1.5.3	Metode Pengumpulan Data.....	14
1.6	Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		17
2.1	Pemerintah Dan Tindakan Pemerintah.....	17
2.1.1	Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan.....	17
2.1.2	Pejabat Tata Usaha Negara.....	17
2.1.3	Tindakan Hukum Pemerintah.....	18
2.1.4	Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.....	20
2.2	Pengertian Hukum Administrasi Negara.....	26
2.3	Sember Kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara.....	26
2.4	Tindakan Pejabat Tata Usaha Negara	29
2.4.1	Penggusuran.....	30
2.4.2	Domein Verklaring.....	30
2.5	Peradilan Tata Usaha Negara.....	31
2.5.1	Asas-Asas Khusus Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.....	32
2.5.2	Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara.....	32
2.5.3	Sengketa Tata Usaha Negara.....	35
2.5.4	Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara.....	36
2.5.5	Keputusan Tata Usaha Negara.....	38
BAB III HASIL PENELITIAN		52
3.1	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 59/G/2016/PTUN-JKT.	
3.1.1	Kasus Posisi.....	42

3.1.2 Posita.....	45
3.1.3 Petitum.....	46
3.1.4 Pembuktian.....	47
3.1.5 Pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Dalam Putusan Nomor 59G/2016/PTUN-JKT.....	51
3.1.6 Amar Putusan Perkara Nomor 59/G/2016/PTUN-JKT.....	54
3.2 Putusan Mahkamah Agung Nomor 267K/TUN/2016.....	61
3.2.1 Pertimbangan hakim Mahkamah Agung.....	61
3.2.2 Amar putusan.....	62
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	62
4.1 Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 2779 Tahun 2015 Dalam Perkara Nomor 267K/TUN/2016 Berdasarkan Undang-Undang Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.....	64
4.2 Pertimbangan Hukum Hakim.....	79
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	86
5.1 Kesimpulan	86
5.2 Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	
LEMBAR BIMBINGAN 1	
LEMBAR BIMBINGAN 2	

MOTTO

“SUCCESS IS THE ABILITY TO GO FROM ONE FAILURE TO ANOTHER
WITH NO LOSE OF ENTHUSIASM”

(Sir Winston Churcill, Great Britain Prime Minister On World War II)

“KESUKSESAN ADALAH KEMAMPUAN UNTUK BERANJAK DARI
SUATU KEGAGALAN KE KEGAGALAN YANG LAIN TANPA
KEHILANGAN KEINGINAN UNTUK BERHASIL”

Kupersembahkan Skripsi ini untuk;

- ❖ Orangtua Tercinta
- ❖ Kakak dan Adik
- ❖ Almamaterku
- ❖ Para Sahabatku



DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
MA	Mahkamah Agung
PTUN	Pengadilan Tata Usaha Negara
SK	Surat Keputusan
HAN	Hukum Administrasi Negara
AAUPB	Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik



DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Riwayat Hidup Penulis
2. Lembar Konsultasi Pembimbing Skripsi 1
3. Lembar Konsultasi Pembimbing Skripsi 2
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 267K/TUN/2016

